

DAKWAH ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI

Oleh: Budi Suprpto

spbudhi@gmail.com

Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia dan Mahasiswa
S3 Studi Media, Pascasarjana Universiti Malaya Malaysia

Pengantar

Dakwah Islam adalah suatu gerakan penyebaran nilai-nilai spiritual yang bisa mendorong terjadinya transformasi dan reformasi sosial yang luar biasa. Sejarah Islam telah mencatat kegemilangan dari kekuatan gerakan transformatif ini. Secara umum jika aktivitas dakwah mengambil bentuk sebagai proses tranformasi sosial, maka ia akan masuk ke berbagai dimensi kehidupan. Artinya pergerakan dakwah tidak bisa lagi hanya semata sebagai bagian dari kegiatan sirimonial dan ritual bagi individu dan sekelompok pemeluk agama berekenaan. Tetapi dia akan menyentuh ke berbagai sisi kehidupan individu dan masyarakat. Sebab dalam pengertian ini, misi dakwah adalah penciptaan tatanan sosial dan budaya yang didasarkan kepada nilai-nilai etika atau moralitas dari ajaran agama tersebut. Karena itu sudah sepantasnya jika aktivitas dakwah Islam ditujukan untuk membentuk cara pandang dunia (*worldview*), sikap, dan perilaku individu dan masyarakat yang terikat erat kepada moralitas religius. Jika religiusitas diterjemahkan ke dalam bentuk kesalehan perilaku, maka kesalehan itu tidak hanya bersifat individual, tetapi harus menyata kepada kesalehan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Artinya setebal dan sekuat apa pun daripada keyakinan agama seseorang, tidaklah ada manfaatnya jikalau hal itu hanya

tersimpan di dalam hati, dan menjadi milik pribadi atau kelompok secara eksklusif, tanpa diterjemahkan ke dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Penterjemahan yang paling hakiki dari keimanan adalah tindakan yang dipenuhi oleh semangat kepedulian untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial dan mencegah segala penyimpangan dan salah guna kuasa, sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Dalam konteks ini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah anak kandung dari perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan ketidakadilan, kesengsaraan, keterbelakangan dan keadaan sejenis yang diderita rakyat adalah cucu-cucunya. Dan kejahatan (kemungkaran) yang paling kejam di muka bumi dan “berdampak sistemik” adalah tindakan salah guna kuasa.

Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Melawan Korupsi

Dalam Agama Islam konsep asasi ajaran seperti yang dinyatakan di atas, disebut dengan *amar makruf* dan *nahi mungkar*, yaitu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sedangkan aktivitas menyeru dan mengajarkan nilai-nilai amar makruf dan nahi mungkar ini disebut dengan dakwah. Menurut Mahmoud,¹ dakwah adalah aktivitas menebar kebaikan dan melarang kebatilan dalam bentuk seruan disertai contoh tindakan.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya 'Ulumu al-Din* menulis : “Sesungguhnya *Amr Ma'ruf Nahyi 'An Munkar* adalah tonggak agama terbesar, yang paling penting dan menjadi dasar diutus para Nabi seluruhnya. Sekiranya kewajiban ini

diabaikan, pengetahuan dan amalannya dilalaikan, kenabian akan sia-sia, agama akan hancur, kebingungan meluas, kesesatan menular, kebodohan menyebar, kerusakan dan kehancuran merata-rata. Maka binasalah orang yang beribadah, walau mereka tidak merasakannya kecuali pada hari akhir.”²

Murtadha Muthahhari³ pun membuat kenyataan, bahawa jatuh bangunnya suatu masyarakat, khasnya masyarakat Islam salah satunya ditentukan oleh apakah mereka mengamalkan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar atau tidak. Bila umat Islam melecehkan pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar ini, maka mereka akan mengalami kehancuran atau kejatuhan. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran: 104 dan 110, dinyatakan bahawa manusia yang terbaik dan beriman adalah yang suka menyeru kepada kebajikan, iaitu menyuruh kepada yang makruf dan bertindak untuk mencegah dari yang mungkar. Dalam Islam tingkat ketauhidan atau keimanan seseorang kepada Tuhan dapat diukur dari seberapa besar seseorang melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW: “Barangsiapa melihat *kemunkaran* (kejahatan) lalu ia mampu mengubah dengan tangannya (kekuasaannya) maka hendaklah mengubahnya, jika tidak mampu mengubah dengan tangannya maka ubahlah dengan lisannya, lalu jika juga tidak mampu

¹ Sheikh Ahmad Mahmoud, 1995, The Da'wah to Islam, First Edition, www.khilafah.com, (1/8/2010, 08:25pm)

² Dalam Jalaluddin Rakhmat, 2006, Islam dan Pluralisme, Akhlaq Qur'an Menyikapi Perbedaan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

³ Dalam Hamzeh Ali Vahidi, 2011, *Pemikiran Muthahari dan Muhammad Abduh; Sebuah Telaah Komparatif*, Lembaga Pendekatan Mazab-Mazab Islam, http://www.taqrif.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id=767:pemikiran-muthahari-dan-muhammad-abduh-sebuah-telaah-komparatif-3&catid=44:mirase-moshtarak&Itemid=145 (11/1/2011, 23:30pm)

maka dengan hatinya, padahal yang demikian itu adalah selemah-lemah iman” (HR Muslim).

Secara struktural, ada tiga pihak yang diperintah oleh hadits di atas dalam mencegah dan memberantas kemungkaran termasuk kejahatan KKN.⁴ Pihak pertama adalah pemerintah atau elit pemegang kekuasaan. Kata tangan di sini dimaknai sebagai simbol kekuasaan. Dalam pengertian ini pemerintah adalah pihak yang secara legal diwajibkan oleh konstitusi melaksanakan tugas tersebut. Sebab pemerintah atas nama negara memiliki segala kelengkapan, regulasi dan otoritas untuk mencegah dan memberantas segala bentuk kemungkaran demi tegaknya hukum, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat.

Pihak kedua adalah masyarakat. Dalam konstelasi praktik penegakan hukum posisi masyarakat berada berada di bawah kekuasaan negara (pemerintah). Dalam kedudukannya itu masyarakat hanya bisa berseru memberi masukan, baik secara vertikal maupun horisontal, dan berteriak menyampaikan kritik korektif terhadap kebijakan dan tindakan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilakukan oleh penguasa. Sementara pada level horisontal, warga masyarakat secara kolektif, pemuka masyarakat, para alim, dan ahli ilmu (sebagai representasi kehendak masyarakat), bisa melakukan pencegahan kemungkaran dengan cara terus menerus (secara istiqomah) menjaga dan menumbuhkan ketinggian nilai-nilai moral dan tauhid, dimulai dari wilayah keluarga sampai dengan wilayah

⁴ Sidik Tono memaknai hadits tersebut dalam perspektif membangun moralitas bangsa [Drs. Sidik Tono, M.Hum, *Menumbuhkan Semangat Dalam Memperbaiki Moral Bangsa*, <http://alislamiyah.uji.ac.id/2013/09/17/menumbuhkan-semangat-dalam-memperbaiki-moral-bangsa/> (27/4/2014/20:00)]

komunitas sosial.

Pihak ketiga adalah individu warga masyarakat. Secara individual kuasa yang dimiliki bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan adalah paling lemah dibanding dua pihak yang disebut terdahulu. Wilayah jangkauan individu juga terbatas, yaitu hanya kepada diri sendiri dan maksimal pada wilayah keluarga dekat atau keluarga inti. Oleh karena itu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan hati. Artinya beralaskan kepada kesadaran individual dan spiritual, setiap orang wajib mencegah diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan kemungkaran dan suka berbuat kebaikan dan keteladanan demi kemaslahatan sosial yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Alqur'an, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At Tahriim: 8).

Kalimat penutup dari hadits di atas menyatakan bahwa mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Jika makna pernyataan itu adalah bersifat kualitatif, maka sesungguhnya secara spiritual perintah mencegah dan memberantas kemungkaran tersebut diwajibkan atas setiap individu. Caranya adalah dengan tindakan saling ingat dan mengingatkan dan bekerja sama secara interpersonal dalam hal berbuat kebaikan. Allah mewajibkan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." [QS. Al-Ma'idah: 2]. "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar” [QS. At-Taubah: 71].

Upaya mencegah dan memberantas penyakit kronis yang bernama KKN, yang telah meporakporandakan sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, seharusnya ditransformasikan menjadi sebuah kesadaran sosial menuju kepada gerakan sosial dan gerakan budaya dalam masyarakat. Jika hal yang demikian yang dikehendaki, maka antara ketiga pihak di atas tidak bisa dipisahkan. Sebab ketiganya adalah satu kesatuan yang harus bersinergi dan terintergrasi untuk membangun kesadaran sosial dan menumbuhkan nilai-nilai gerakan sosial dan budaya tersebut. Dalam kerangka kerja besar ini, pemerintah harus menjadi inisiator dan lokomotif bagi penyadaran dan gerakan pencegahan dan pemberantasan. Masyarakat bertugas melakukan sosialisasi dan pembudayaan pada berbagai strata dan kelompok sosial. Sedangkan individu warga negara berkomitmen membangun kesadaran diri dan keluarga secara moral dan spiritual, bagi mendorong dan melaksanakan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit KKN tersebut secara terus-menerus (istiqomah).

Jika hanya mengandalkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, tanpa dibarengi dengan gerakan sosial dan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka upaya pemberantasan yang dimaksudkan akan berjalan lambat. Bahkan jika dalam perjalanan terjadi kecelakaan sejarah, maka kegagalan bisa terjadi.

Dakwah Islam dan Kesadaran Sosial

Adalah akibat dari pertarungan budaya dan ideologi global yang tidak

seimbang, di mana negara dan masyarakat Indonesia pada posisi yang lemah, maka saat ini di tengah masyarakat dan di berbagai tingkatan terjadi perubahan pola fikir, sikap, dan perilaku yang cenderung pragmatik, materialis, dan hedonistik yang semua itu mengabdikan kepada kepuasan inderawi, nafsu jasmani, dan duniawi. Kepentingan individual dan kelompok menjadi tujuan utama, sedangkan nilai-nilai moralitas sosial dan spiritual semakin terpinggirkan. Mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya yang ada bertindak koruptif, kolusif, dan nepotis demi kepentingan diri dan kelompok. Pada situasi yang demikian kita perlu bertanya, "Apa saja yang dilakukan oleh para penganjur majlis dakwah bagi membangun moral dan jiwa religious masyarakat bagi menghadapi perilaku yang pragmatis dan merusak tersebut?".

Jika aktivitas dakwah adalah suatu gerakan untuk menyeru kepada kebaikan dan menghalangi tindak kejahatan diurus dengan pendekatan manajemen yang tepat, dan mampu menciptakan kesalehan sosial, politik, dan budaya, maka pastilah sebuah masyarakat adil, makmur, sejahtera, aman dan sentosa bisa mewujudkan. Islam sangat tegas memerintahkan kesalehan yang demikian, agar umat manusia mampu mencapai kualitas hidup sebagai masyarakat utama (*khairah ummah*). Anjuran untuk berbuat makruf dan menghalangi terhadap yang mungkar, dalam terminologi sosiologi, bertujuan membentuk spirit kepedulian sosial. Sedangkan secara politik menghendaki ada sikap dan perilaku ambil peduli terhadap masalah-masalah kebijakan publik dan perilaku politik kekuasaan sebagai pengamalan dari *democratic participative*.

Untuk keperluan pencegahan dan pemberantasan kemungkaran, maka

pesan komunikasi dakwah haruslah lebih banyak menitikberatkan kepada pembinaan pola fikir dan sikap kritis terhadap berbagai-bagai bentuk penyimpangan dalam masyarakat, yang didasarkan kepada nilai-nilai amar makruf dan nahi mungkar. Pembentukan pola fikir dan sikap kritis semacam itulah sesungguhnya inti pati (spirit) dari aktiviti dakwah yang dipraktikkan oleh agama-agama besar di dunia. Salah satu wujud terpenting dari sikap dan pola fikir kritis tersebut adalah suatu kesadaran sosial yang terus menerus mendorong sikap dan perilaku peduli terhadap permasalahan sosial, budaya dan politik, yang bisa menimbulkan ketimpangan dan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, M. Din Syamsuddin⁵ mengatakan, bahawa dakwah yang memberi tekanan kepada nilai-nilai amar makruf dan nahi mungkar, secara substantif adalah mempunyai dimensi sosial dan politik. Sedangkan menurut M. Amien Rais,⁶ Islam bukan hanya agama tauhid yang meletakkan Tuhan sebagai Yang Maha Esa semata, tetapi lebih daripada itu. Di dalam ajaran tauhid Islam didapati nilai-nilai sosial yang tinggi seperti keadilan, demokrasi, persamaan, dan pemurataan. Islam bukan hanya agama langit yang tidak membumi. Sebaliknya Islam membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Inilah yang beliau maksud dengan tauhid sosial. Iaitu Islam bukan hanya agama yang melulu mementingkan rituality kosong, melainkan agama yang berinteraksi dan peka dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penindasan, kezaliman, penyalagunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Ajaran tauhid sosial juga berarti

⁵ M. Din Syamsuddin, 1995, *The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia*, Studia Ismaika, Indonesian Journal For Islamic Studies, VoL 2, No. 2, 1995

⁶ M. Amien Rais, 1995, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan

umat Islam harus berinteraksi dengan berbagai permasalahan sosial dan ikut ambil bagian untuk menanggulangi.

Mengikut kepada pendapat kedua tokoh di atas dapat dikatakan, bahawa aktivitas dakwah harus mampu menanamkan kesadaran sosial di benak masyarakat. Secara sederhana kesadaran sosial adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi sadar, memahami, dan merasa adanya suatu realitas yang dihadapi oleh masyarakat, yang secara moral dan norma yang ada penuh dengan masalah, atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang ada. Seperti kesukaran memperoleh sumber daya publik, penderitaan, ketidakadilan, keterpinggiran (*marginalizing*), dan lain-lain keadaan yang sejenis dengan itu.⁷ Seseorang yang memiliki kesadaran sosial tinggi, selalu merasa punya tanggung jawab atas berbagai persoalan sosial maupun politik yang terjadi di dalam masyarakat di mana ia tinggal. Oleh itu ia menganggap dirinya perlu bertindak untuk ambil bagian guna mencari jalan keluar daripada masalah tersebut, baik secara individu maupun bersama orang lain.⁸

Pengertian di atas selari dengan pendapat Greene dan Kamimura (2003).⁹ Mereka menyatakan, bahawa kesedaran sosial adalah salah satu elemen kunci bagi kewujudan tindakan sosial. Kedua pakar tersebut mendefinisikan kesedaran sosial sebagai daya pendorong dalam diri seseorang untuk berani: a) bersikap tegas bagi melawan ketidakadilan sosial; b) menumbuhkan kesedaran masyarakat terhadap

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Social_consciousness, (27/4/2012/2:37am)

⁸ <http://dictionary.reference.com/browse/social+conscience> (27/4/2012/2:55am).

⁹ Shirley R. Greene & Mark Kamimura, 2003, *Ties That Bind: Enhanced Social Awareness Development Through Interaction With Peers*. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education, Portland, Oregon, November 12-15, 2003

alam sekitar ; c) menggalakkan toleransi dan saling menghormati adanya perbezaan kaum ; d) memegang teguh nilai-nilai etika.

Definisi Greene dan Kamimura di atas semakin memperteguh, bahawa kesedaran sosial adalah tenaga pendorong yang utama bagi suatu tindakan peduli sosial dan politik. Seseorang yang mempunyai kesedaran sosial adalah orang yang telah mampu keluar dari tempurung ego diri, dan masuk kepada peribadi yang berwatakan atau berjiwa lebih suka mengambil berat kepada kepentingan masyarakat. Dan kerana itu secara spiritual jiwa mereka menjadi tenang dan merasa berguna apabila bisa berpartisipasi bagi mengeluarkan masyarakat jerat masalah.

Putnam (1994)¹⁰ menganggap agama (religioitas) adalah suatu modal sosial. Ia bisa menyediakan suatu alat yang dapat digunakan oleh warga masyarakat, sebagai rujukan dalam pengambilan kata putus bagi suatu tindakan bersama apabila terjadi masalah sosial. Selain kepercayaan keagamaan, elemen-elemen lain yang boleh berfungsi sebagai modal sosial di antaranya pola kerja sama antar warga masyarakat, norma-norma sosial, kepercayaan kepada institusi sosial dan politik, dan partisipasi warga masyarakat (Scheufele dan Shah, 2000).¹¹

Melihat elemen-elemen modal sosial yang disebut di atas tidaklah akan mewujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, jika tidak ada kesedaran sosial dari warga masyarakat. Oleh kerana itu boleh dikatakan bahawa kesedaran sosial

¹⁰ Putnam, Robert D., 1994; *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press.

¹¹ Scheufele, D.A. dan Shah, D., 2000, *Personality Strength and Social Capital: The Role of Dispositional and Informational Variable in The Production of Civic Participation*, Communication Research Journal, Volume 27 (2000)

adalah bentuk modal sosial yang paling nyata bagi menjaga eksistensi kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kembali pada perbincangan hubungan antara nilai-nilai agama dan kesadaran sosial.¹² Terbukti dalam masyarakat barat yang terkenal dengan faham sekular sekalipun, ternyata nilai-nilai agama masih menjadi faktor penting dalam memberi makna terhadap realitas sosial mahupun politik yang mereka hadapi pada zaman pasca moden sekarang ini. Demikian pula pada saat menentukan sikap terhadap masalah-masalah sosial dan politik, nilai-nilai moralitas agama menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Oleh sebab itu mereka pun lebih suka berkongsi dengan organisasi agama berbanding dengan institusi sosial yang lain. Terutama apabila mereka hendak ikut ambil bahagian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang menuntut aktiviti kesukarelawanan (*voluntarily*).

Salah satu bukti itu ditemui daripada kajian Nisbet dan kawan-kawan (2003)¹³ tentang sikap dan perilaku sosial dan politik masyarakat Amerika yang berkait dengan faktor agama, boleh digunakan menguatkan pernyataan di atas. Mereka membuat kesimpulan, walaupun kepercayaan penduduk Amerika terhadap perbadanan awam khususnya institusi-institusi kerajaan terus menurun sejak 1950-an, tetapi sokongan mereka terhadap aktiviti keagamaan tetap tinggi. Secara konsisten kepercayaan mereka terhadap institusi agama dan para pemuka agama lebih tinggi, jika dibandingkan dengan perbadanan mahkamah, kongres,

¹² Dalam artikel ini pengertian kesadaran sosial mencakup kesadaran politik. Demikian pula terma tindakan peduli sosial, mengandung pengertian kepedulian politik. Sebab munculnya tindakan peduli politik, secara teoritik pasti didahului oleh adanya kesadaran sosial.

¹³ D.A. Scheufele, M.C. Nisbet, and D. Brossard, 2003, *Pathway to Political Participation: Religion, Communication Contexts, and Mass Media*, International Journal of Public Opinion Research, Volume 15, No. 3.

perbankan, pendidikan awam, media massa, dan korporasi.

Bahkan lembaga agama adalah tempat yang paling disukai oleh warga Amerika untuk menggabungkan diri sebagai sukarelawan. Menjadi sukarelawan adalah salah satu bentuk kepedulian sosial yang sangat tinggi nilainya, kerana mereka pastilah berkorban harta-benda, fikiran, dan jiwa demi orang lain yang menderita kerana pelbagai sebab. Aktiviti para sukarelawan yang bergabung kepada organisasi keagamaan adalah bentuk kepedulian sosial yang paling dominan daripada masyarakat Amerika.¹⁴

Apa yang baru saja diuraikan adalah suatu bukti, betapa strategisnya posisi agama bagi membina dan menjaga nilai-nilai moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka aktivitas dakwah (penyiaran agama) sudah semestinya diarahkan secara tajam dan menukik kepada upaya transformasi nilai-nilai spiritualitas/religiusitas, yang bermuara kepada terbentuknya suatu gerakan sosial dan budaya, yang secara terus-menerus menginisiasi dan menggelorakan semangat meluluhlantakkan tindak kejahatan tersebut.

Posisi strategis aktivitas dakwah dapat dilihat dari beberapa alasan. Antara lain, pertama kegiatan dakwah atau tabligh selalu diikuti oleh peserta secara massal. Hal ini menjadikan penyampaian pesan ajaran agama, secara kuantitatif bisa menjangkau jumlah penerima yang banyak. Belum lagi jika aktivitas tersebut

¹⁴ Wuthenow, R., 1999, Mobilizing Civic Engagement: The Changing Impact of Religious Involvement, Dalam: T. Skocpol and M.P. Fiorina (Eds), Civic Management in American Democracy, Washington, D.C.: Brookings/ Russell Sage

diselenggarakan melalui media massa, maka jangkauan pesan jauh lebih massif. Kedua, pada umumnya para juru dakwah memiliki kredibilitas yang tinggi di mata peserta dakwah. Seharusnya posisi psiko-sosial semacam itu bisa dimanfaatkan oleh para juru dakwah untuk membangun cara pandang, kesadaran sosial, dan kesadaran moral yang berguna bagi melahirkan gerakan sosial dan budaya anti korupsi beserta anak cucunya. Pertanyaannya, “Sudahkah para aktivis dakwah agama (Islam) sudah melakukan kerja yang demikian?”

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini adalah kisah ketegasan Rasulullah Muhammad SAW. Wujud ketegasan yang hendak dikisahkan ini adalah contoh nyata dari etika teologis yang ditegakkan oleh Baginda Rasulullah SAW dalam melawan kejahatan.¹⁵

Suatu ketika pada masa pembebasan kota Mekah, ada seorang wanita Quraisy yang mencuri. Wanita tersebut adalah seorang bangsawan dari Bani Makhzum. Para penegak hukum bingung dalam memutuskan perkara tersebut.

Dalam kebingungan itu mereka berunding, dan salah seorang dari mereka mengusulkan untuk membicarakan kasus itu kepada Usamah. Melalui Usamah mereka berniat memintakan syafa'at atau ampunan dari Baginda Rasulullah SAW atas wanita tersebut. Para pengadil itu tahu bahwa Usamah adalah salah seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mereka berharap Rasulullah mengabulkan

¹⁵ Kisah ini dipetik dari Agustiar Nur Akbar yang ditulis di Republika Online, dan penulis ubah seperlunya. [<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/04/20/ljxfv-ketegasan-rasulullah-saw> Rabu, 20 April 2011, 08:25 WIB]

permintaan Usamah.

Ketika Usamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW perihal keinginan mereka. Rasulullah SAW menjawab, “Apakah engkau hendak membela seseorang agar terbebas dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT?” Setelah bertanya demikian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah, “Wahai manusia sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah, apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Akan tetapi apabila rakyat jelata yang lemah mencuri, mereka jatuhkan hukuman kepadanya. Demi Dzat yang Muhammad berada dalam genggamannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar memotong tangan wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut bertaubat dan menikah. (HR Bukhari Muslim)

Di sini sangat jelas sekali bagaimana ketegasan Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah Allah swt. Bagaimana Rasulullah saw bersikap terhadap yang hak dan yang bathil, kejahatan dan kebaikan. Rasulullah SAW tidak mengenal istilah kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam menegakan hukum yang bertujuan tercapainya keadilan serta kemashlatan bersama. Rasulullah SAW tidak pandang bulu, tidak melihat latar belakang. Tidak melihat apakah ia pejabat, atau bangsawan. Kepada putrinya sendiri yang sangat ia cintai, tidak menjadi jaminan untuk lolos dari hukuman. Begitu cintanya kepada putrinya itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Fatimah adalah separuh dari jiwanya. Meskipun demikian, seandainya sang putri tercinta kedapatan mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya.

Nampak jelas sekalai, bagaimana Rasulullah SAW bertindak tegas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kekuasaan, kemuliaan, dan keutamaan yang beliau miliki tidak digunakan secara semena-mena. Beliau tidak melebihkan satu dengan yang lainnya jika sudah memasuki ranah hukum. Termasuk kepada darah dagingnya sendiri yang beliau cintai.

Referensi

- Sheikh Ahmad Mahmoud, 1995, *The Da'wah to Islam*, First Edition, www.khilafah.com (1/8/2010, 08:25pm)
- Jalaluddin Rakhmat, 2006, *Islam dan Pluralisme, Akhlaq Qur'an Menyikapi Perbedaan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Hamzeh Ali Vahidi, 2011, *Pemikiran Muthahari dan Muhammad Abduh; Sebuah Telaah Komparatif*, Lembaga Pendekatan Mazab-Mazab Islam, http://www.taqrif.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id=767:pemikiran-muthahari-dan-muhammad-abduh-sebuah-telaah-komparatif-3&catid=44:mirase-moshtarak&Itemid=145 (11/1/2011, 23:30pm)
- Sidik Tono, Drs., M.Hum, *Menumbuhkan Semangat Dalam Memperbaiki Moral Bangsa*, <http://alislamiyah.uui.ac.id/2013/09/17/menumbuhkan-semangat-dalam-memperbaiki-moral-bangsa/> (27/4/2014/20:00pm)
- M. Din Syamsuddin, 1995, *The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia*, Studia Ismaika, Indonesian Journal For Islamic Studies, VoL 2, No. 2, 1995
- M. Amien Rais, 1995, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan
- http://en.wikipedia.org/wiki/Social_consciousness (27/4/2012/2:37am)
- <http://dictionary.reference.com/browse/social+conscience> (27/4/2012/2:55am).
- Shirley R. Greene & Mark Kamimura, 2003, *Ties That Bind: Enhanced Social Awareness Development Through Interaction With Peers*. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education, Porland, Oregon, November 12-15, 2003
- Robert D. Putnam 1994; *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modrn Italy*, Princeton: Princeton University Press.
- D.A. Scheufele, dan D Shah, 2000, *Personality Strength and Social Capital: The Role of Dispositional and Informational Variable in The Production of Civic Participation*, Communication Research Journal, Volume 27 (200)
- D.A. Scheufele, M.C. Nisbet, and D. Brossard, 2003, *Pathway to Political Participation: Religion, Communication Contexts, and Mass Media*,

- International Journal of Public Opinion Research, Volume 15, No. 3.
- R. Wuthenow, 1999, *Mobilizing Civic Engagement: The Changing Impact of Religious Involvement*, Dalam: T. Skocpol and M.P. Fiorina (Eds), *Civic Management in American Democracy*, Washington, D.C.: Brookings/Russell Sage
- Agustiar Nur Akbar, *Ketegasan Rasulullah, Saw* Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/04/20/ljxfv-ketegasan-rasulullah-saw> Rabu, 20 April 2011, 08:25 WIB